

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah (Hartadi, 2022). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ivonía Auxiliadora Freitas Marcal et al., 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. (Hartadi, 2022). Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada periode 2028-2029. Strategi utama yang dicanangkan untuk mencapai target tersebut meliputi optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, penguatan konsumsi rumah tangga, serta pengembangan sektor ekonomi baru seperti semikonduktor dan transisi energi (Kementrian Keuangan, 2024).

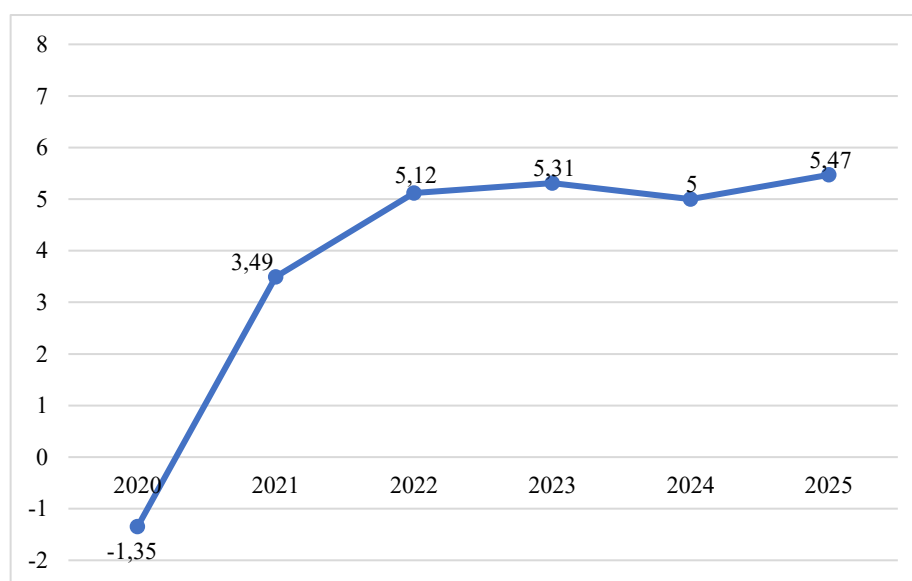
Pencapaian target pertumbuhan yang tinggi ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, kesiapan kapasitas fiskal daerah, kualitas pengelolaan keuangan serta sumber daya manusia di setiap kabupaten/kota menjadi salah satu faktor penentu utama dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perbedaan potensi sumber daya, struktur ekonomi, serta kapasitas pembangunan menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah (Asriati, 2025). Oleh karena itu, analisis pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah menjadi penting untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi secara lebih mendalam.

Salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Jawa Barat menyumbang sekitar 12,7% terhadap PDB Indonesia dan termasuk salah satu kontributor terbesar perekonomian nasional Bersama DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Barat seharusnya mampu menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sejalan, bahkan melampaui rata-rata nasional. Namun demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih menunjukkan fluktuasi dan cenderung stagnan. Dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat pada tingkat nasional, tetapi juga perlu dianalisis pada tingkat regional, khususnya pada level kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik ekonomi, potensi sumber daya, serta kapasitas fiskal antar daerah yang dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih rinci melalui data empiris. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur

menggunakan laju pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Gambar berikut menyajikan tren laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2025.

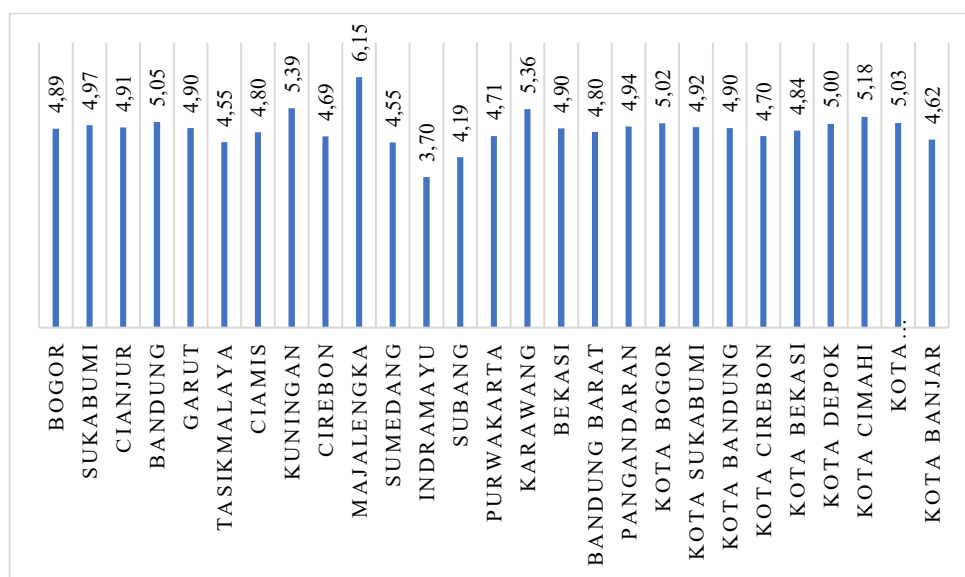


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2026

Gambar 1. 1 Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode 2020-2025. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,35 persen sebagai dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, terjadi pemulihan pada tahun 2021-2022 dengan peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada periode 2023-2024, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan melambat sebelum kembali meningkat pada tahun 2025. Kemudian Jika ditinjau lebih rinci pada tingkat kabupaten/kota, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih

terdapat beberapa wilayah yang berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, yaitu di bawah 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di tingkat daerah belum merata dan masih menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana tercermin pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2026

Gambar 1. 2 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2025 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.2, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang relatif beragam, namun secara umum masih berada pada kisaran di bawah 5 persen. Sebagian besar daerah mencatat pertumbuhan ekonomi pada rentang 3-4 persen, sementara hanya beberapa daerah yang mampu mencapai pertumbuhan di atas 5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah pascapandemi belum berlangsung secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Apabila dibandingkan antarwilayah, terdapat perbedaan capaian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa

Barat. Kabupaten Majalengka tercatat memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi, sedangkan Kabupaten Indramayu relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi kapasitas ekonomi, sektor unggulan, dan efektivitas kebijakan pembangunan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan fiskal daerah melalui optimalisasi desentralisasi fiskal, pengelolaan dana perimbangan, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata. Selain itu, fluktuasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor eksternal maupun kemampuan internal daerah dalam mengelola sumber daya fiskal.

Dalam konteks ekonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan penting dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata (Umasangadji et al., 2022). Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan serta menentukan prioritas belanja yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak tahun 2000, yang menandai transformasi besar dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Tajuddin & Kessi, 2025). Melalui kebijakan ini,

pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara mandiri sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (Andrea, 2020). Kewenangan dalam mengatur pendapatan dan belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta mempercepat pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dengan demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan (Wijono & Ratnamulyani, 2011).

Dalam teori yang dikemukakan Richard A. Musgrave (BKF, 2021) desentralisasi fiskal memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya melalui anggaran, khususnya dalam bentuk belanja modal untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Rasio belanja modal mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi ini dalam mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi daerah, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi stabilisasi lebih berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran, yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kurang dominan dalam lingkup pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun ketiga fungsi tersebut saling berkaitan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi alokasi sebagai saluran utama pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

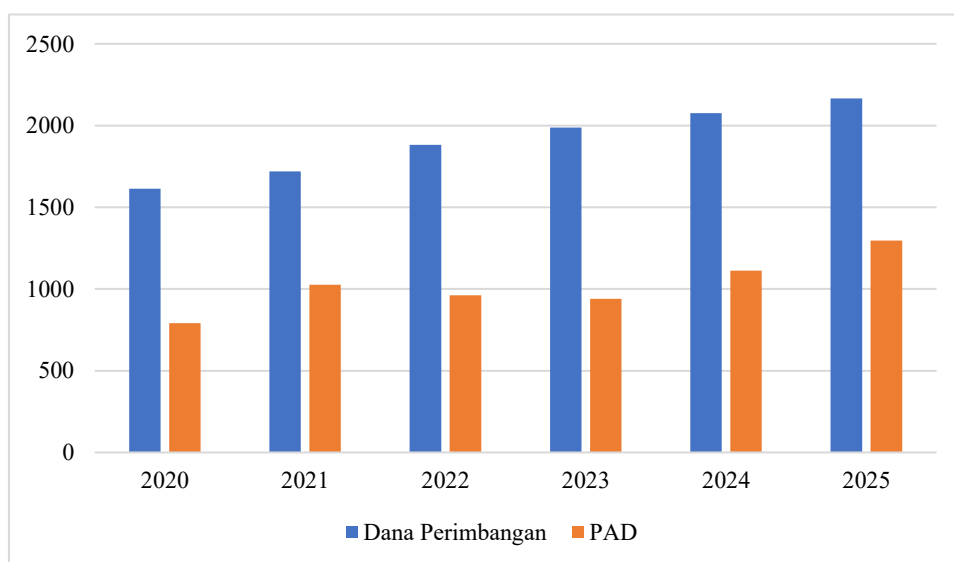
daerah. Dalam penelitian ini, fungsi alokasi tercermin dari penggunaan PAD dan Dana Perimbangan untuk pembangunan, sementara fungsi distribusi dan stabilisasi diharapkan tercermin melalui dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Salah satu indikator utama dalam desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah dalam mengelola sumber penerimaan, yang terdiri dari dana perimbangan sebagai transfer dari pemerintah pusat serta Pendapatan Asli Daerah sebagai cerminan kemandirian fiskal daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Yuliawati et al., 2024). Dalam penelitian ini, transfer ke daerah direpresentasikan melalui dana perimbangan yang diterima daerah yang merupakan agregasi dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana transfer dari pusat membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah, khususnya bagi wilayah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat (Wahyudin & Hastuti, 2020).

Dengan adanya dana perimbangan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah melalui pembiayaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana

perimbangan, kemampuan fiskal daerah juga tercermin dari Pendapatan Asli Daerah. PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Perkembangan dana perimbangan dan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2026

Gambar 1.3 Perbandingan Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3, terlihat bahwa dana perimbangan masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dibandingkan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain, PAD menunjukkan tren yang cenderung meningkat, yang mengindikasikan adanya

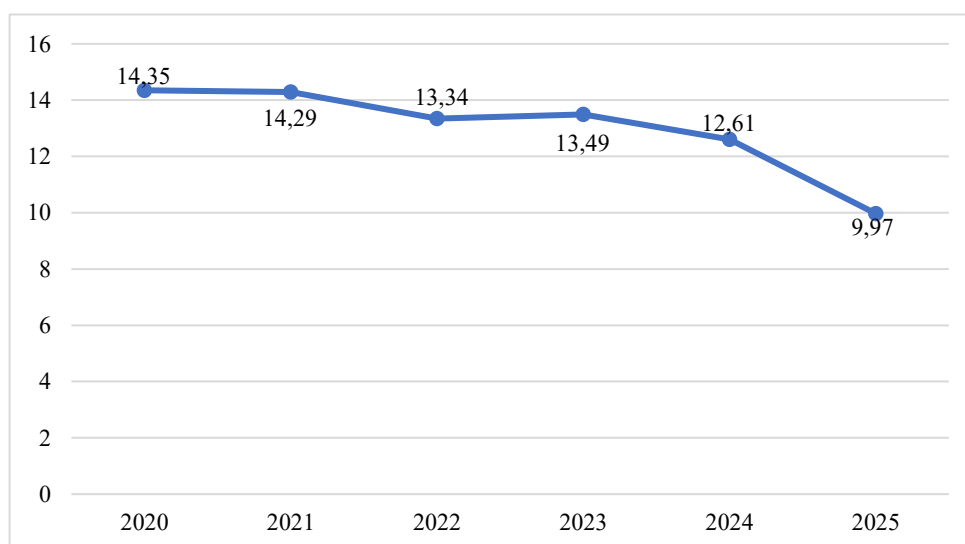
upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, perbedaan kemampuan fiskal antar daerah berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Ginting et al., 2019).

Dominasi dana transfer dalam struktur penerimaan daerah di Jawa Barat mencerminkan belum tercapainya kemandirian fiskal daerah, dimana peran Pendapatan Asli Daerah belum optimal sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan (Khoirunisa & Sulaeman, 2022). Hal ini menjadi masalah fundamental karena ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal, dimana perekonomian daerah menjadi lebih rentan terhadap guncangan fiskal di tingkat nasional, terutama ketika daerah belum memiliki pondasi PAD yang kuat sebagai sumber pembiayaan yang berkelanjutan (Haryanto, 2018). Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer juga dapat mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dan berpotensi mengurangi optimalisasi PAD. Perbedaan tingkat ketergantungan fiskal tersebut menunjukkan adanya variasi kapasitas daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota (BKF, 2021).

Selain dari sisi penerimaan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan belanja, khususnya belanja yang bersifat produktif (Kristian et al., 2020). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah rasio belanja modal yang mencerminkan proporsi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka

panjang. Alokasi belanja modal yang optimal diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio belanja modal yang lebih tinggi menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan konektivitas wilayah, sehingga berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, penting untuk melihat perkembangan rasio belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2025 yang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2026

Gambar 1.4 Fluktuasi Rasio Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025

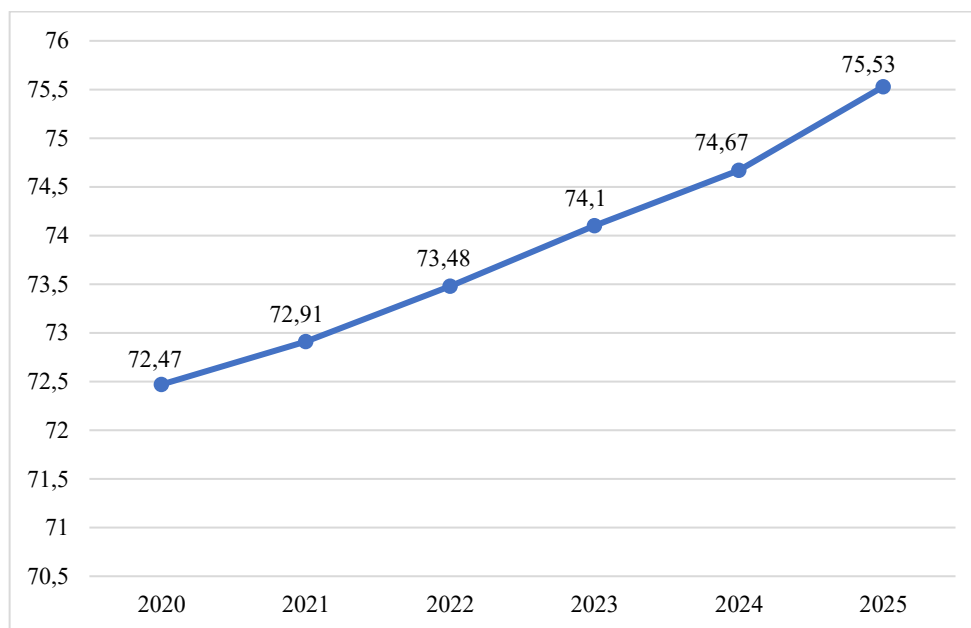
Berdasarkan Gambar 1.4, terlihat bahwa rasio belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan selama periode 2020-2025. Pada tahun 2020-2021, rasio belanja modal masih berada pada kisaran yang relatif stabil, yaitu sekitar 14 persen. Namun, pada tahun-tahun berikutnya rasio tersebut menunjukkan tren menurun, dari 13,34 persen pada tahun

2022 menjadi 12,61 persen pada tahun 2024, bahkan turun cukup signifikan menjadi 9,97 persen pada tahun 2025.

Penurunan rasio belanja modal ini mengindikasikan bahwa proporsi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan produktif semakin berkurang. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur serta mengurangi daya dorong terhadap aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, rasio belanja modal diduga ikut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal. Dari sisi fiskal, salah satu indikator penting adalah rasio belanja modal pemerintah daerah, yang mencerminkan proporsi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan aset produktif seperti infrastruktur, fasilitas publik, dan sarana ekonomi lainnya. Sementara itu, dari sisi nonfiskal, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mencerminkan capaian pembangunan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Tingginya IPM menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (alkhoiriyah sayidah fitri, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perkembangan IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2025 yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2026

Gambar 1.5 Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.5, terlihat bahwa rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2020-2025. IPM mengalami kenaikan dari 72,27 pada tahun 2020 menjadi 75,53 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli masyarakat.

Meskipun demikian, Peningkatan IPM tidak serta-merta menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil, sebagaimana terlihat pada fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berperan, namun tetap perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini IPM digunakan sebagai variabel kontrol untuk melihat pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah menjadi instrumen utama yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan. Peningkatan kapasitas fiskal melalui kedua sumber tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, efektivitas pengelolaan anggaran juga berperan penting, yang tercermin melalui rasio belanja modal sebagai indikator alokasi belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang (Biswan, 2022). Dalam perspektif *Public Finance*, keuangan publik merupakan studi mengenai peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. Pemerintah melakukan pengeluaran sebagai bentuk intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang publik seperti infrastruktur. Oleh karena itu, belanja modal yang dialokasikan secara efektif dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut memengaruhi produktivitas dan kinerja ekonomi daerah. Dalam kerangka teori human capital, investasi pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak akan meningkatkan kemampuan individu dalam menghasilkan output ekonomi. Teori ini dipelopori oleh Gary Becker (Hasan et al., 2020) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia merupakan bentuk

investasi yang memberikan return dalam bentuk peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dengan demikian, daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi (Zainal, 2014).

Dengan demikian, kombinasi antara kapasitas fiskal, kualitas pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal, dan kualitas sumber daya manusia diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, baik secara langsung maupun melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, hubungan antara desentralisasi fiskal yang diprosikan melalui Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa studi seperti Riyadi & Woyanti (2022), Wibowo & Lukman (2025), menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun penelitian lain dari Hartadi (2022), Sigalingging & Rijal (2023), menunjukkan hasil yang tidak signifikan bahkan negatif. Hal serupa juga terjadi pada Dana Perimbangan, di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif signifikan (anggara, 2025), sementara studi lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan (Ernita et al., 2020); (Irmanelly et al., 2023).

Selain itu, penelitian Dwi Citra Haryati et al. (2025), Ricardo Parera (2022), menjelaskan peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umumnya menunjukkan pengaruh positif, namun tingkat signifikansinya masih bervariasi tergantung pada efisiensi dan efektivitas pengelolaannya. Di sisi lain,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan hasil yang beragam, dengan sebagian penelitian menemukan pengaruh positif signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan arah negatif akibat ketidakseimbangan pembangunan (Dinarjito & Dharmazi, 2020).

Lebih lanjut, sebagian besar penelitian terdahulu masih meneliti variabel-variabel tersebut secara parsial atau menggunakan pendekatan yang berbeda seperti variabel moderasi maupun intervening, serta belum banyak yang secara simultan menguji pengaruh desentralisasi fiskal dengan memasukkan IPM sebagai variabel kontrol, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam periode terbaru.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan IPM sebagai variabel kontrol menggunakan data panel periode 2020-2025.

Berdasarkan celah penelitian yang telah diidentifikasi, kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian variabel desentralisasi fiskal yang diproksikan melalui Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah, serta memasukkan rasio belanja modal sebagai bentuk implementasi kebijakan fiskal daerah dan Indeks Pembangunan Manusia dalam satu model analisis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menguji pengaruh secara parsial atau menggunakan variabel tersebut sebagai moderasi maupun intervening, penelitian

ini menempatkan variabel-variabel tersebut secara simultan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Kedua, penelitian ini secara khusus mengatasi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menguji kembali hubungan tersebut menggunakan data panel terbaru, sehingga diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang lebih aktual. Kemudian, penelitian ini menggunakan fokus wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan periode pengamatan 2020-2025 yang relatif masih terbatas dalam literatur sebelumnya. Pemilihan periode ini juga mencerminkan dinamika ekonomi pasca pandemi, sehingga memberikan konteks analisis yang lebih relevan terhadap kondisi terkini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru melalui pendekatan model, kelengkapan variabel, serta pembaruan konteks wilayah dan periode penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2025?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama terhadap

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2025.
2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020-2025.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Publik. Secara lebih spesifik, penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memasukkan rasio belanja modal sebagai bentuk implementasi kebijakan fiskal daerah serta Indeks Pembangunan Manusia sebagai faktor penentu kualitas pembangunan manusia dalam satu model analisis. Selain itu, hasil penelitian ini

juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya pada konteks pemerintah daerah di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif melalui pengelolaan belanja modal dan peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia.

Selain itu, bagi pemerintah pusat maupun pengambil kebijakan lainnya, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan desentralisasi fiskal agar lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembandingan untuk kajian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang Keuangan Publik dan Ekonomi Pembangunan. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki ketersediaan data selama periode pengamatan tahun 2020-2025.

Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perannya sebagai salah satu kontributor utama perekonomian nasional serta tingginya dinamika transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, dan Banjar

1.5.2 Waktu Penelitian

Penulis memulai penelitian ini dari minggu pertama bulan Desember 2025 dengan pengajuan judul kemudian dilanjutkan dengan konsultasi terkait penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi.

Tabel 1.1 Matriks Waktu Penelitian

[illegible]